**Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Program Keluarga**

**Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan**

**Masyarakat Gampong Baro Kecamatan**

**Langsa Lama Kota Langsa**

**Muhammad Ikhsan1, M. Yahya2, Nurjannah3**

1IAIN Langsa, 207muhammad.ikhsan@gmail.com

2IAIN Langsa, yahya@iainlangsa.ac.id

3IAIN Langsa, nurjannah@iainlangsa.ac.id

***ABSTRACT***

*The purpose of this study was to determine the use of village fund allocations and the Family Hope Program in improving the welfare of the community in Langsa City. The data collection method used is qualitative. The subjects of this research are the people of Gampong Baro, Kec. Langsa Lama, Langsa City is the recipient of village fund and PKH allocations. Data collection techniques used are interviews and documentation. Data analysis techniques in this study include data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the use of village fund allocations in Gampong Baro, Langsa City was consumptive or used to meet daily needs. For the welfare of the poor in Gampong Baro, Langsa City, it is better to allocate village funds that are productive in nature, in order to improve their economy for the recipients. The provision of assistance funds for the Family Hope Program is only able to relieve the family's economic burden in terms of education and health and assist in meeting daily needs, but has not been able to improve the welfare of the people in Gampong Baro, Langsa City.*

***Keywords:*** *Village Fund Allocation, Family Hope Program (PKH), Community Welfare*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan alokasi dana desa dan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Langsa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Kualitatif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Gampong Baro, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa penerima alokasi dana desa dan PKH. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa pemanfaatan alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa bersifat konsumtif atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mensejahterakan masyarakat miskin di Gampong Baro Kota Langsa lebih baik alokasi dana desa diberikan yang bersifat produktif, agar dapat memperbaiki perekonomian mereka para penerima dana. Pemberian Sedangkan dana bantuan Program Keluarga Harapan hanya mampu meringankan beban ekonomi keluarga dalam hal pendidikan maupun kesehatan dan membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun belum mampu mensejahterakan masyarakat di Gampong Baro Kota Langsa.

**Kata Kunci:** Alokasi Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan Masyarakat

**PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang, karena kondisi pembangunan mereka yang masih belum stabil. Kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu negara, yang akan berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. (Fitrhi, 2017:134) Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat.

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha. (Beik, 2016:70) Untuk itu diperlukan usaha yang maksimal agar terhindar dari kemiskinan dan mendapatkan kehidupan yang sejahtera.

Kesejahteraan merupakan impian setiap individu. Kesejahteraan sosial merupakan keadaan dimana seseorang merasa nyaman, tentram, bahagia, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin diwujudkan agar masyarakat tersebut dapat hidup dengan layak serta mengembangkan dirinya.

Aceh adalah provinsi yang kaya karena Aceh memiiki sumber daya alam yang melimpah. Namun nyatanya pada tahun 2020 lalu, Aceh pernah mendapatkan penghargaan sebagai provinsi termiskin. Hal ini tentu saja sangat disayangkan, mengingat Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kementrian Sosial Republik Indonesia berupaya untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yaitu dengan meluncurkan berbagai program nasional untuk pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Program-program untuk mensejahterakan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program dana desa yang dimulai pada tahun 2015 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tersebut mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan asset desa. Pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pendapatan desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Pendapatan desa yang dimaksud adalah dana desa.

Setiap desa yang menerima dana desa juga mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD kabupaten/kota yang berupa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Desa mendapat bagian sebesar 10 persen dari APBD dan memperoleh bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. (Dachi, 2019:8) Berdasarkan hasil observasi peneliti dari berbagai peristiwa yang terjadi, banyaknya dana desa juga mengakibatkan pada banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa oleh aparatur pemerintahan. Sejak digulirkan Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi (Kemendesa PDTT) telah menerima 932 pengaduan mengenai penyimpangan penggunaan dana desa. Dana desa pada dasarnya diberikan oleh pemerintah pusat untuk memeratakan pembangunan antara desa dan Kota sehingga muncul kesenjangan. Di Kota Langsa dana desa berasal dari Dinas Sosial ke Gampong dan dibagi dalam tiga hal yaitu BLT DD, Aparatur dan Kegiatan Maulid.

Bentuk usaha pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di Kota Langsa selain dari alokasi dana desa, pemerintah juga membuat kebijakan terkait pemberdayaan keluarga miskin, salah satu kebijakannya yaitu membuat Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan di bawah kendali dan tanggung jawab Kementrian Sosial Republik Indonesia. Program ini secara umum adalah bentuk pemberian uang tunai secara langsung kepada masyarakat miskin yang sudah terdaftar sebagai penerima PKH. (Suharto, 2019: 16).

Program Keluarga Harapan (PKH) terfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan merupakan kunci untuk melakukan aktivitas dengan baik sebab dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika kesehatan terjamin maka pendidikan seseorang akan baik, dengan kualitas pendidikan yang layak dan baik maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. PKH dalam bidang pendidikan memberikan peluang lebih baik kepada anak-anak yang sedang mengenyam bangku pendidikan. Jika kedua aspek tersebut sudah terpenuhi maka kualitas sumber daya manusia meningkat sehingga masyarakat dapat mandiri dan mampu mengentaskan diri dari lingkaran kemiskinan.

Tujuan utama PKH adalah meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya hidup sejahtera bagi keluarga miskin. (Kementerian Sosial RI, Program Keluarga Harapan, 2016). Hal ini dibuktikan dengan Pedoman Pelaksanaan PKH yang menjelaskan bahwa bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai dana PKH secara bersyarat yaitu dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran.

Seharusnya pada jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Sedangkan dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun nyatanya, jumlah penerima dana PKH tidak sesuai dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ada. Berdasarkan observasi peneliti diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian antara jumlah rumah tangga miskin yang ada dengan jumlah rumah tangga miskin yang menerima dana PKH. Selain itu dengan jumlah dana PKH yang diterima setiap rumah tangga miskin belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun, ibu hamil, masa nifas dan berada pada lokasi terpilih. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. (Muhtadin,2019:9). Namun nyatanya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang penerima bantuan dana PKH yaitu Ibu Fatimah, beliau menyatakan bahwa penerima bantuan dana PKH banyak yang belum tepat sasaran. Artinya masih terdapat masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan dana PKH. Sedangkan yang menerima dana PKH terdapat orang-orang yang bukan tergolong RTSM. Hal ini menjadi masalah dalam masyarakat selama ini yang harus segera dicari solusi penyelesaiannya.

Gampong Baro merupakan sebuah Desa atau Gampong yang ada di Kecamatan Langsa lama Kota langsa, Aceh. Gampong Baro merupakan salah satu gampong di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat yaitu berjumlah 3.201 jiwa.(BPS Kota Langsa tahun 2020). Masyarakat Gampong Baro juga banyak yang menjadi penerima bantuan dana desa dan PKH serta belum pernah dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan alokasi dana desa, dan PKH di Gampong Baro. Jumlah penerima PKH di Gampong Baro terdiri dari 30 KK. Oleh sebab itu peneliti memilih Gampong Baro Kota Langsa untuk menjadi lokasi penelitian pada penelitian ini.

Penelitian ini akan memberikan informasi terkait pemanfaatan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Langsa dan pemanfaatan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Langsa.

**LANDASAN TEORI**

**Alokasi Dana Desa**

Menurut Karimah dkk (2014: 598) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yangtelah dijalankan memiliki tujuan besar yangkurang lebih sama yaitu merombak ortodok sipemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangankepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yangsemula dominan dan sentralis, melalui metodealokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Alokasi dana desa merupakan bagian darikeuangan desa yang diperoleh dari bagi hasilpajak daerah dan bagian dari dana perimbangankeuangan pusat dan daerah yang diterima olehkabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasaldari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbukadengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

**Program Keluarga Harapan**

Menurut Utomo (2014: 31), program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinandan kedudukan PKH merupakan bagian dariprogram-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika merekamemenuhi persyaratan yang terkait denganupaya peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama padakelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Dalam pelaksanaannya PKH memiliki tujuan untuk mengurangiangka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah prilaku RTSM yang relative kurang peningkatan kesejahteraan.

**Kesejahteraan**

Menurut Widyastuti (2012: 3), pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Teori-teori ekonomi sering mengaitkan antara tingginya tingkat kesejahteraan dengan kualitas hidup yang semakin tinggi pula. Semakin tinggi pendapatan akan menyebabkan semakin tinggi pula kesejahteraan yang dilihat dari besarnya konsumsi mereka.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.(Bungin, 2005: 90)

**Metode Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

**Metode Analisis Data**

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu meliputi (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data adalah suatu proses kegiatan menyelesaikan dan menyederhanakan suatu data yang diperoleh dari awal pengumpulan data sampai penyusunan laporan penelitian.
2. Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi sehingga dapat memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan merupakan pengungkapan akhir terhadap hasil penafsiran, evaluasi dan tindakan. (Margono, 2005:37)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Langsa**

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Sebelum dilakukan pengalokasian dana desa kepada masyarakat, maka hal pertama yang harus dilakukan ialah membuat perencanaan untuk mengetahui apakah perencanaan alokasi dana desa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa. Demikian halnya dengan pengalokasian dana desa yang dilakukan di Gampong Baro. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara peneliti dengan Geuchik dan penerima manfaat alokasi dana desa di Gampong Baroh Kota Langsa yang menjelaskan mengenai apakah perencanaan alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa adalah sebagai berikut:

Menurut Geuchik Gampong Baro:

“Ya, dari pemerintah Gampong dalam merencanakan pengelolan dana desa kami akan selalu melakukan musyawarah dengan masyarakat gampong untuk mengetahui apa saja yang sedang dibutuhkan Gampong dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan Gampong.”

Menurut Pengawas dana bantuan PKH Gampong Baro:

“Ya. Perencanaan alokasi dana desa dibuat berdasarkan apa yang dibutuhkan desa. Perencanaan dilakukan dengan musyawarah dengan seluruh perangkat desa dan juga masyarakat setempat dan dihadiri pengawas, agar perencanaan yang dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa.”

Ibu Erna menyatakan bahwa;

“Untuk selama ini menurut saya alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa”.

Ibu Sujannah menyatakan bawa;

“Ya.. menurut saya selama ini alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa.”

Ibu Maimunah menyatakan bahwa;

“Kalau menurut saya belum. Masi ada masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuaan alokasi dana desa tapi nyatanya tidak menerimanya.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu-Ibu penerima manfaat alokasi dana desa di Gampong Baroh mengenai apakah perencanaan alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa.

Setelah dilakukan perencanaan, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan dalam pengalokasian dana desa ialah pelaksanaan. Tahap pelaksanaan alokasi dana desa dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan alokasi dana desa sudah dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya atau belum. Demikian halnya yang dilakukan di Gampong Baro, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan geuchik dan beberapa penerima alokasi dana desa diketahui bahwa:

Menurut Geuchik Gampong Baro:

“Ya tentu saja, dalam setiap penggunaan alokasi dana desa harus dilakukan berdasarkan perencanan yang sudah dibuat sebelumnya, jika ada yang tidak sesuai dengan perencanaan, maka harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan perangkat desa dan harus dapat dilaporkan dengan rinci.”

Menurut Pengawas dana bantuan PKH Gampong Baro:

“Selama ini yang saya amati di Gampong Baro semuanya berjalan sebagaimana mestinya, pelaksanaan alokasi dana desa memang dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan.”

Ibu Erna menyatakan bahwa;

“Ya sebelum melakukan pelaksanaan alokasi dana, maka sebelumnya harus dibuat perencanaan terlebih dahulu dan pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat”.

Ibu Deva juga menyatakan bahwa;

“Saya kurang tau kalau tentang perencanaanya sebelumnya seperti apa ya.. Cuma yang saya tau untuk kebutuhan desa saat ini dana desa sudah digunakan dengan baik.”

Ibu Salamah juga menyatakan bahwa;

*“Ya tentu saja. Karena pelaksanaan alokasi dana desa harus berdasarkan perencanaan yang telah dibuat terlebih dahulu*.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa di Gampong Baroh sudah dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan apabila ada yang tidak sesuai dengan perencanaan, maka harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan perangkat desa dan harus dapat dilaporkan dengan rinci.

Setelah dilakukan perencanaan dan pelaksanaan, maka tahap selanjutnya dalam pengalokasian dana desa ialah pelaporan. Setiap dana desa yang diberikan oleh pemerintah harus dibuat laporan yang berisikan semua pengeluaran yang dilakukan menggunakan dana desa. Laporan dana desa juga harus dibuat dengan jelas dan rinci. Demikian halnya dengan yang dilakukan di Gampong Baro Kota Langsa, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan geuchik Gampong Baro dan beberapa orang penerima alokasi dana desa mengenai apakah setiap pengeluaran dana desa di Gampong Baro sudah dilakukan pelaporan yang ditulis dan dirincikan sesuai dengan hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut;

Menurut Geuchik Gampong Baro:

“Ya tentu saja. Semua pengeluaran dari dana desa, selalu kami laporkan secara tertulis dengan rinciannya yang lengkap.”

Menurut Pengawas dana bantuan PKH Gampong Baro:

“Ya, saya selalu rutin mengawasi laporan dana desa di Gampong Baro, dan selama ini yang saya amati laporan yang dibuat selalu rinci dan sudah sesuai dengan pelaksanaan yang sudah ditentukan, jika ada kekeliruan, maka saya akan segera meminta laporan untuk ditinjau ulang atau direvisi kembali.”

Ibu Sujannah mengungkapkan bahwa;

“Ya tentu saja. Setiap pengeluaran dana desa harus selalu dilaporkan secara rinci.”

Ibu Nurhaya menyatakan bahwa;

*“Ya semua pengeluaran dan pemasukan dari dana desa Gampong Baro selalu dibuat laporan.”*

Ibu Salamah menyatakan bahwa;

“Ya apapun yang dikeluarkan menggunakan dana desa harus ditulis dan dirincinkan dan harus dilaporkan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai apakah setiap pengeluaran dana desa di Gampong Baro sudah dilakukan pelaporan yang ditulis dan dirincikan sesuai dengan hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa benar bahwa setiap pengeluaran dana desa di Gampong Baro, Kecamatan Langsa Lama sudah dilakukan pelaporan yang sudah ditulis dan dirincikan sesuai dengan hasil pelaksananaan alokasi dana desa yang sudah dilakukan.

Setelah dilakukan pelaporan dana desa, maka hal berikutnya yang harus dimiliki oleh pengelola dana desa ialah bersedia untuk bertanggung jawab secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan, sebagaimana dengan yang dilakukan di Gampong Baro Kota Langsa. Peneliti melakukan wawancara kepada geuchik Gampong Baro dan penerima alokasi dana desa mengenai apakah pengelola alokasi dana desa di Gampong Baro bersedia untuk mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut;

Menurut Geuchik Gampong Baro:

“Ya, kami perangkat desa bekerja sama untuk memajukan Gampong Baro dengan bekerja sesuai dengan bidang kami masing-masing dan bersedia untuk bertanggung jawab secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan kami laporkan.”

Menurut Pengawas dana bantuan PKH Gampong Baro:

“Ya itu harus ya, setiap perangkat desa tanpa terkecuali harus bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan.”

Ibu Erna juga menyatakan bahwa;

“Ya setiap pemasukan dan pengeluaran dari dana desa harus ditulis dan dirincikan dengan jelas dan kemudian dibuat laporannya.”

Ibu Sujannah mengungkapkan bahwa;

“Ya. Pihak-pihak perangkat desa terkait harus bersedia untuk mempertangung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan.”

Menurut Ibu Maimunah bahwa;

“Ya harus bersedia bertanggung jawab. Karena itu sudah tugas dari perangkat desa mengenai pelaksanaan alokasi dana desa yang dilaporkan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai apakah pengelola alokasi dana desa di Gampong Baro bersedia untuk mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa benar bahwa perangkat desa di Gampong Baroh bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan.

**Pemanfaatan Dana PKH terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Langsa**

Salah satu program sosial yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah Program Keluarga Harapan.Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin. Sebagai imbalannya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkaitdengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia,yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama Program Keluarga Harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan bantuan dana atau uang tunai.

Program PKH memberikan peluang yang lebih baik dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Berdasarkan surat Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia No. 1293 tahun 2016 tentang Reorganisasi Pelaksanaan PKH Pusat dan Daerah, PKH dialokasikan ke daerah-daerah yang telah memenuhi syarat yang ditentukan. Salah satunya di Gampong Baro Kota Langsa.

Setelah menerima bantuan dana dari PKH, diharapkan aspek kesehatan, ekonomi serta pendidikan masyarakat penerima bantuan PKH di Gampong Baro Kota Langsa mengalami perubahan dan tentunya akan berangsur-angsur membaik. Perubahan tersebut dapat dilihat dari perubahan pada penerima dana bantuan PKH sebelum mendapatkan bantuan dan sesudah mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan.

Untuk mengetahui apakah pemberian dana PKH di Gampong Baro Kota Langsa sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti melakukan wawanara kepada Geuchik Gampong Baro dan beberapa orang penerima dana PKH di Gampong Baro. Adapun hasil wawancara dengan beberapa penerima program keluarga harapan di Gampong Baro Kota Langsa yang menjelaskan mengenai apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin:

Menurut Geuchik Gampong Baro:

“Kalau menurut saya, bantuan PKH dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin, karena program PKH salah satunya terdiri dari program pendidikan yang mewajibkan anak penerima bantuan PKH harus tetap aktif bersekolah sampai tingkat SMA. Jadi, hal ini tentu sangat membantu orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, dengan adanya PKH ini anak-anak mereka bisa tetap bersekolah dan diharapkan anak-anak tersebut kelak dapat meningkatkan status sosial ekonomi keluarganya.”

Menurut Pengawas dana bantuan PKH Gampong Baro:

“Pemerintah memberikan dana bantuan PKH diharapkan agar dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.”

Menurut Ibu Erna:

“Kalau meningkatkan status sosial ekonomi menurut saya tidak. Tapi dana PKH ini bisa membantu meringankan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.”

Menurut Ibu Deva:

“Kalau meningkatkan sepertinya tidak.. karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak.. lebih tepatnya menurut saya bantuan PKH ini membantu meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat.”

Menurut Ibu Salamah:

“Ya karena mungkin ada masyarakat miskin yang sulit memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan adanya bantuan PKH ini dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.”

Hasil wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa ada yang mengangap pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin dan ada juga yang menganggap bahwa pemberian dana bantuan PKH tidak dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat tapi mampu membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat miskin.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Geuchik Gampong Baro dan penerima dana bantuan PKH mengenai apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar adalah sebagai berikut:

Menurut Geuchik Gampong Baro:

“Ya, karena selain program pendidikan, PKH juga memiliki program kesehatan untuk masyarakat miskin. Seperti menjamin kesehatan pada Ibu hamil, ibu nifas dan balita.”

Menurut Pengawas dana bantuan PKH Gampong Baro:

“Ya, karena di program dana PKH memang ada program untuk meningkatkan kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar. Jadi nntik ada pihak-pihak yang menangani tentang PKH ini datang ke Gampong untuk meninjau bagaimana kondisi kesehatan orang-orang yang berhak menerima PKH.”

Menurut Ibu Nurhaya, beliau menyatakan bahwa:

“Ya karena kesehatan ibu hamil, nifas dan bayi balita adalah salah satu perioritas dari pemberian dana bantuan PKH.”

Hal serupa juga telah diutarakan oleh Ibu Erna yang menyatakan bahwa:

“Ya karena dana bantuan PKH memang dikhususkan salah satunya bagi kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.”

Pernyataan berikutnya yang disampaikan oleh Ibu Deva yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya ya .. karena bantuan PKH ini lebih dikhususkan bagi kesehatan ibu hamil dan ibu yang memiliki bayi balita.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa benar dana bantuan PKH dapat meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.

Pemberian dana bantuan PKH diharapkan dapat membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat miskin khususnya dari segi pendidikan. Demkian halnya dengan masyarakat penerima dana PKH di Gampong Baro Kota Langsa, hasil wawancara peneliti dengan penerima bantuan pemanfaatan PKH mengenai apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal Pendidikan adalah sebagai berikut;

Menurut Gechik Gampong Baro:

“Ya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, adanya bantuan alokasi dana desa dan PKH ini sangat membantu orang tua untuk bisa menyekolahkan anaknya dengan harapan dikemudian hari dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.”

Menurut Pengawas dana bantuan PKH Gampong Baro:

“Ya namanya juga bantuan ya, seperti dana bantuan desa bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun melengkapi kebutuhan sekolah anak, kalau PKH selain program kesehatan, ada juga program pendidikan yang memang diutamakan diberikan pada keluarga miskin yang memiliki anak usia sekolah.”

Menurut Ibu Salamah:

“Ya khususnya dana PKH ya... karena salah satu tujuan dari dana PKH adalah meningkatkan pendidikan anak-anak usia wajib sekolah.”

Menurut Ibu Sujannah:

*“Ya.. dengan adanya dana bantuan ini.. bagi keluarga miskin yang awalnya sangat kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, maka dengan dana bantuan ini sangat membantu sekali dalam memenuhi kebutuhan pendidikan ini*.”

Menurut Ibu Erna:

“Ya karena bantuan PKH yang didapatkan memang diperuntukan untuk dana pendidikan anak-anak miskin usia wajib sekolah dan ada petugas yang mengawasinya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai apakah penerima PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal pendidikan dapat disimpulkan bahwa bantuan PKH yang didapatkan memang diperuntukan untuk dana pendidikan anak-anak miskin usia wajib sekolah dan ada petugas yang mengawasinya. Masyarakat Gampong Baro dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mencukupkan dengan penghasilan yang mereka peroleh, makan dengan apa adanya yang penting tetap bisa makan. Namun dalam memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah. Mereka selalu kekurangan dan kesulitan. Adanya program PKH ini sekiranya dapat membantu biaya pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sekolah serta dapat memberikan pemenuhan gizi bagi keluarga dan sisanya digunakan untuk tambahan modal usaha, sehingga penghasilan dapat digunakan untuk kebutuhan pokok lainnya.

Selain mensejahteraan masyarakat miskin dari segi pendidikan, manfaat dari pemberian dana bantuan PKH lainnya ialah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat miskin dari segi kesehatan. Sebagaimana hasil hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Baro dan penerima manfaat dana PKH mengenai apakah penerima dana PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal kesehatan adalah sebagai berikut:

Menurut Geuchik Gampong Baro:

“Ya, karena adanya bantuan alokasi dana desa dan PKH ini bagi masyarakat miskin yang tidak punya uang untuk berobat, maka biaya pengobatannya dapat ditanggung karena adanya kartu PKH. Selain itu dengan adanya bantuan dana desa bagi masyarakat miskin dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dalam mengkonsumsi makanan yang bergizi.”

Menurut Pengawas dana bantuan PKH Gampong Baro:

“Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau PKH memang sudah ada program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat miskin.”

Menurut Ibu Deva;

“Ya kalau kita ada punya cukup uang kalau kita bisa memenuhi makanan-makanan yang bergizi dan apabila sakit bisa langsung dibawa untuk berobat.”

Menurut Ibu Maimunah:

“Kalau untuk kesehatan kami punya kartu BPJS yang gratis itu.. itu biasanya yang kami gunakan untuk berobat kerumah sakit. Dengan adanya bantuan pemerintah ini bisa membantu kami untuk memenuhi gizi makanan khususnya bagi ibu hamil dan bayi balita.”

Menurut Ibu Erna:

“ya karena dengan adanya bantuan uang dari alokasi dana desa atau PKH bisa memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil ataupun balita.”

Berdasarkan wawancara dengan penerima dana bantuan PKH di Gampong Baro Kota Langsa, maka dapat disimpulkan bahwa dana desa dan PKH sangat berperan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. karena dengan dana yang diberikan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, mampu membeli makanan yang bergizi seperti ikan, susu, sayur maupun buah yang otomatis hal ini dapat menjaga kesehatan keluarganya, sehingga kualitas dari kesehatan masyarakat dari sebelum menerima dana desa dan PKH hingga setelah menerima dana desa dan PKH mengalami peningkatan.

Selain mensejahteraan masyarakat miskin dari segi pendidikan dan kesehatan, manfaat dari pemberian dana bantuan PKH lainnya ialah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat miskin dari segi ekonomi. Sebagaimana hasil hasil wawancara dengan penerima bantuan pemanfaatan PKH mengenai apakah penerima dan bantuan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal ekonomi adalah sebagai berikut;

Menurut Geuchik Gampong Baro:

“Ya, adanya bantuan dana desa dan PKH tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, dapat meningkatkan pendidikan anak hingga SMA dan juga dapat memberikan jaminan kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.”

Menurut Pengawas dana bantuan PKH Gampong Baro:

“Ya, jadi program dari PKH itu ada 3, yaitu meningkatkan pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi. Sedangkan alokasi dana desa dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin sehari-hari.”

Menurut Ibu Erna:

“Lebih tepatnya membantu meringankan kebutuhan rumah tangga miskin, bukan mensejahterakan.. kalau mensejahterakan menurut saya pemberian bantuan usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.”

Menurut Ibu Sujannah:

“Ya .. karena menurut saya alokasi dana desa dan PKH ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin untuk meningkatkan ekonomi mereka.”

Menurut Ibu Nurhaya:

“Kalau menurut saya belum bisa dikatakan sejahtera.. karena kehidupan kami masih sama seperti sebelum menerima dana PKH. Hanya saja saat ini kami merasa sangat terbantu dengan adanya dana bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penerima dana PKH mengenai apakah penerima dana PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal ekonomi dapat peneliti simpulkan bahwa pemberian alokasi dana desa dan PKH mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, namun belum mampu mensejahterakan masyarakat miskin.

**Pembahasan**

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan pendamping PKH dan sepuluh masyarakat penerima bantuan dana PKH di Gampong Baro, maka diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Pemanfaatan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Gampong Baro Kota Langsa membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti lauk pauk untuk makan sehari-hari. Namun alokasi dana desa tidak diberikan secara rutin. Jadi masyarakat tidak bisa berharap sepenuhnya dari bantuan alokasi dana desa. Alokasi dana desa yang diperoleh masyarakat di Gampong Baro hanya bersifat membantu, namun tidak mensejahterakan. Karena sifatnya hanya konsumtif atau membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Gampong Baro berharap alokasi dana desa yang diberikan bersifat produktif atau dalam bentuk modal usaha. Agar mereka dapat meningkatkan perekonomian mereka dan tidak selamanya menjadi penerima alokasi dana desa
2. Pemanfaatan dana bantuan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Gampong Baro Kota Langsa belum terlaksana secara maksimal. Dana bantuan PKH hanya membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal pendidikan untuk anak-anaknya dan juga kesehatan. Adanya dana bantuan PKH di Gampong Baro Kota Langsa berdampak terutama pada pendidikan anak-anak. Bagi masyarakat miskin yang sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dana bantuan PKH ini sangat membantu, jadi mereka tidak perlu lagi memikirkan pendidikan anaknya. Pemerintah telah memberikan bantuan untuk anak-anaknya bersekolah. Hal ini diharapkan agar tidak ada lagi anak-anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah. Namun dalam hal mesejahterakan kehidupan masyarakat dana PKH ini belum mampu mensejahterakan masyarakat, karena dana bantuan yang diberikan hanya cukup untuk meringankan kebutuhan sehari-hari, tidak cukup untuk dijadikan modal untuk melakukan usaha atau berdagang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada penerima alokasi dana desa dan PKH juga diketahui bahwa pemberian alokasi dana desa dan PKH pada masyarakat miskin Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa dapat memenuhi kebutuhan pada tiga aspek sebagai berikut;

***Pemenuhan Pendidikan Dasar bagi Anak***

Salah satu tujuan selain kesehatan bagi lansia juga memberikan akses pendidikan dasar bagi anak-anak penerima bantuan. Hal ini diimplementasikan dengan menetapkan ketentuan bagi anak peserta program untuk hadir di sekolah minimal 80% kehadiran setiap bulannya. Hal itu dapat berimplikasi terhadap peningkatan jumlah partisipasi sekolah dan kesadaran bahwa sekolah itu penting.

Menurut BKKBN seseorang dikatakan sejahtera apabila kebutuhan pendidikannya terpenuhi. Pemerintah sudah mewajibkan wajib belajar hingga SMA. Program PKH yang sudah berjalan selama ini sudah memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan sekolah mereka tanpa terkendali dengan biaya sekolah dan kebutuhan penunjang sekolah lainnya, seperti seragam sekolah, alat tulis, tas, sepatu dan kebutuhan lainnya.

***Peningkatan kualitas kesehatan***

Program Keluarga Harapan dikatakan berpengaruh terhadap kesehatan keluarga sangat miskin, karena alokasi dana desa dan PKH memberikan bantuan bagi ibu hamil dan balita untuk membantu memenuhi gizi mereka dan dengan adanya persyaratan untuk pemeriksaan rutin, maka kesehatan mereka dapat lebih terbantu, karena mereka juga semakin rajin memeriksakan kandungan dan juga balita mereka ke tempat yang telah disediakan. Selain itu mereka memperoleh kemudahan untuk memeriksakan diri dan keluarga mereka jika ada yang sakit tanpa khawatir dengan biaya pengobatan. Dengan demikian kualitas kesehatan dari keluarga sangat miskin dapat meningkat. Menurut BKKBN seseorang dikatakan sejahtera apabila Ia sehat dan apabila sakit mampu untuk membayar biaya pengobatan.

***Peningkatan Ekonomi***

Penduduk Gampong Baro Kota Langsa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya bergantung pada penghasilannya seperti tukang, petani, serabutan dan lainlain yang tidak memiliki penghasilan tetap. Penghasilan yang tidak tetap ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hanya saja masih kurang memenuhi kebutuhan seperti perumahan yang layak ataupun sanitasi yang baik. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa keluarga sangat miskin masih memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, meskipun mereka dalam status memiliki mata pencaharian karena pendapatan yang mereka peroleh tidak mencukupi untuk memenuhi semuanya.

Hadirnya alokasi dana desa dan program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu meringankan beban hidup mereka meskipun tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh PKH karena PKH hanya diberikan kepada mereka ibu hamil dan anak balita untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka serta memberikan kesehatan terhadap lansia juga.

Kemudian pada anak sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka bantuan PKH tersebut dapat meringankan beban Keluarga penerima Manfaat (KPM), karena mereka tidak perlu lagi menyisihkan pendapatan mereka untuk anak sekolah mereka sehingga pendapatan yang mereka peroleh dapat digunakan memenuhi kebutuhan makanan mereka sehari-hari, pakaian dan bahkan untuk keperluan tempat tinggal mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa kesejahteraan menurut BKKBN kesejahteraan terdiri dari 3 yaitu peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan dan peningkatan ekonomi. Seseorang apabila kebutuhan pendidikannya terpenuhi. Pemerintah sudah mewajibkan wajib belajar hingga SMA. Program PKH yang sudah berjalan selama ini sudah memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan sekolah mereka tanpa terkendali dengan biaya sekolah dan kebutuhan penunjang sekolah lainnya, seperti seragam sekolah, alat tulis, tas, sepatu dan kebutuhan lainnya. Menurut BKKBN seseorang dikatakan sejahtera apabila Ia sehat dan apabila sakit mampu untuk membayar biaya pengobatan. Demikian halnya dari segi ekonomi, seseorang dikatakan sejahtera apabila ia mampu untuk membeli makan keluarganya dengan makanan sehat dn bergizi seta meningkanya pedapatan.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memperoleh kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa bersifat konsumtif atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mensejahterakan masyarakat miskin di Gampong Baro Kota Langsa lebih baik alokasi dana desa diberikan yang bersifat produktif, agar dapat memperbaiki perekonomian mereka para penerima dana alokasi dana desa.
2. Pemberian dana bantuan Program Keluarga Harapan hanya mampu meringankan beban ekonomi keluarga dalam hal pendidikan maupun kesehatan dan membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun belum mampu mensejahterakan masyarakat di Gampong Baro Kota Langsa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah* Edisi Revisi. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi,Ekonomi dan Kebijakan Publik sertaIlmu-Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Prenada Media.

Dachi, Tirsa Ade S. 2019. *Efektivitas Penyaluran Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2017- 2018*. Universitas Sumatera Utara.

Karimah,Faizatul. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desadalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, 2014.*

Kementerian Sosial RI, *Program Keluarga Harapan*, 2016.

Muhtadin. 2019. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Pendidikan dan Kesehatan (Studi Kasus Desa Jati Sawit Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu)*. IAIN Syeikh Nur Jati Cirebon.

Suharto, Edi dan Djuni Thamrin. 2019. *Program Keluarga Harapan: Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa*. Jurnal Aspirasi, Vol. 3, No. 1.

Utomo,Dedy. 2014. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga HarapanKecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, 2014.*

Widyastuti, Astriana. 2012. Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009. Economics Development Analysis Journal, EDAJ 1 (2) (2012).